

Determinan tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia

Siti Mutmainnah, Wahyudin Nor, Monica Rahardian Ary Helmina

Universitas Lambung Mangkurat
Email: st.mutmainnah09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetisi politik, press visibility, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, komitmen kepala daerah, terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia. Data penelitian ini terdiri dari 170 dokumen anggaran selama periode 2016-2020 yang dikumpulkan dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode sensus. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa press visibility dan komitmen kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia. Sedangkan kompetisi politik, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini berkontribusi pada penelitian akuntansi sektor publik dengan meningkatkan pemahaman terhadap tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia.

Kata kunci: komitmen kepala daerah, kompetisi politik, press visibility, transparansi anggaran.

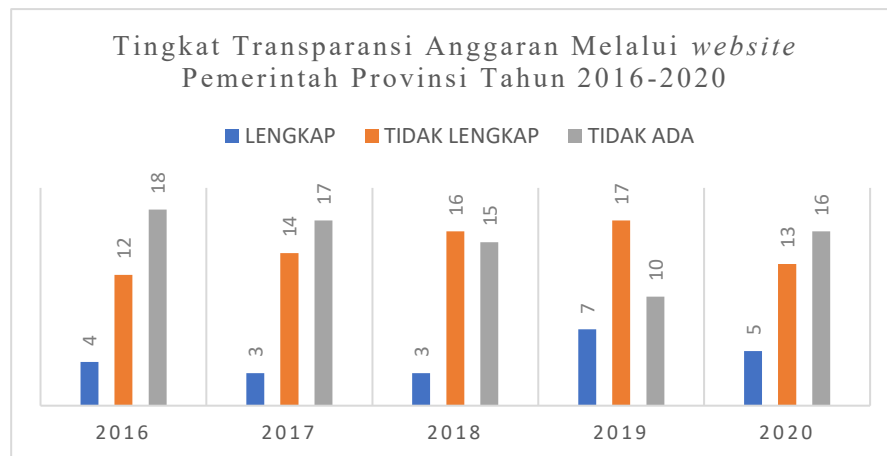
DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art22](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art22)

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menggulirkan kebijakan keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan (Republik Indonesia, 2008). Pemerintah juga menerbitkan instruksi menteri dalam negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), instruksi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyajikan konten dalam *website* resminya dengan nama TPAD.

Transparansi anggaran bertujuan agar publik diberikan akses informasi terkait anggaran publik, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi keputusan tentang pendapatan pemerintah dan pengeluaran atau belanja pemerintah (Klun dkk, 2019). Menurut Mourao dkk, (2020) anggaran pemerintah daerah adalah salah satu dokumen kebijakan yang paling penting karena menyusun program dan tujuan kebijakan pemerintah daerah. Untuk alasan ini, anggaran pemerintah daerah harus dipublikasikan secara tepat waktu, komprehensif, dapat dipahami, serta harus akurat dan dapat diandalkan (Ott dkk., 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, pada gambar 1 menunjukkan tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi masih belum konsisten. Berdasarkan gambar 1 menunjukkan hingga tahun 2020 hanya 5 (lima) provinsi yang mengungkapkan dokumen anggaran secara lengkap, sementara 13 (tiga belas) provinsi tidak lengkap dalam mengungkapkan dokumen anggaran dan 16 (enam belas) provinsi tidak mempublikasikan anggarannya pada *website* resminya. Hal ini menggambarkan pemerintah provinsi belum optimal dalam pelaksanaan regulasi keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Atas fenomena dan fakta tersebutlah yang menjadi dasar peneliti untuk mengidentifikasi hal-hal atau faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia.

Gambar 1. Tingkat Transparansi Anggaran melalui *Website* Pemerintah Provinsi

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Stanic (2018) menyatakan bahwa transparansi anggaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor keuangan (*leverage* dan tingkat utang), faktor politik (kompetisi politik, karakteristik eksekutif, jenis pemerintahan), faktor kependudukan dan media (jumlah penduduk, tingkat akses internet, tingkat pengangguran dan visibilitas media). Penelitian sejenis juga dikembangkan oleh Ott dkk, (2019) yang melakukan penelitian tentang *Online Local Budget Transparency* (OLBT) di negara Kroasia dan Slovenia menggunakan ukuran transparansi anggaran berdasarkan *Open Local Budget Index* yakni ketersediaan 5 dokumen anggaran. Variabel independen yang digunakan diantaranya populasi, kapasitas administrasi, tingkat pengangguran, pendapatan penduduk dan kekayaan pemerintah. Penelitian ini akan fokus pada tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia dengan mengadopsi variabel dari penelitian terdahulu. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi tingkat transparansi anggaran yang akan digunakan diantaranya faktor politik (kompetisi politik), faktor media dan teknologi informasi (*press visibility*, tingkat pembangunan teknologi informasi komunikasi), faktor komitmen kepala daerah. Selain itu yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu tingkat transparansi anggaran diukur berdasarkan ketersediaan dokumen anggaran menurut instruksi menteri dalam negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh tingkat kompetisi politik, *press visibility*, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, serta komitmen kepala daerah terhadap tingkat transparansi anggaran pada *website* pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah provinsi untuk menerapkan transparansi anggaran melalui *website* pemerintah. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi terutama informasi anggaran.

TINJAUAN LITERATUR

Transparansi anggaran merupakan sejauh mana kemudahan warga negara dapat mengakses informasi tentang anggaran dan memberikan umpan balik tentang pendapatan, alokasi, dan pengeluaran pemerintah (Nor dkk, 2021). Tavares & da Cruz, (2017) mendefinisikan *online transparency* yakni publisitas *online* dari semua tindakan pemerintah dan perwakilan mereka untuk memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat sipil secara lengkap, tepat waktu, dan dapat diakses melalui situs web resmi pemerintah. Namun pada realitasnya tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia masih rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu ada berbagai faktor yang diduga memengaruhi tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia.

Berliner & Erlich, (2015) menyatakan bahwa kompetisi politik berperan penting dalam reformasi institusi pemerintah dengan meningkatkan akses informasi. Menurut Ott dkk, (2019) faktor kompetisi politik berpengaruh terhadap *Online Local Budget Transparency*. Semakin tinggi kompetisi politik suatu pemerintah daerah maka akan semakin besar kecenderungan kepala daerah untuk menyediakan informasi

karena akan menanggung biaya pengawasan yang lebih besar dari saingan politiknya (Laswad dkk, 2005). Hal ini sejalan dengan Araujo dan Tejedo-Romero (2016) dan Citro dkk., (2021) yang menyatakan bahwa persaingan politik memengaruhi tingkat transparansi anggaran. Berbeda dengan penelitian Birskyte (2018) menyatakan bahwa tingkat persaingan politik dalam pemilihan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi anggaran.

Faktor berikutnya yang diduga berpengaruh terhadap transparansi anggaran adalah *press visibility*. Laswad dkk, (2005) menyatakan bahwa *press visibility* memiliki hubungan positif terhadap pelaporan keuangan sukarela melalui internet. Mengingat kemampuan media seperti itu, pemerintah dipaksa untuk menjelaskan, menjawab, atau menyangkal masalah khusus yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal ini berdasarkan teori *stewardship* bahwa pemerintah akan berusaha meningkatkan pengungkapan anggaran kepada publik dengan memanfaatkan media *website* agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun, berdasarkan penelitian (García & García-García, 2010) *press visibility* tidak berpengaruh terhadap transparansi anggaran melalui *website*.

Tingkat pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi diduga berpengaruh terhadap tingkat transparansi anggaran melalui *website*. Chen dkk, (2019) menyatakan bahwa tingkat teknologi informasi berpengaruh terhadap transparansi keuangan. Semakin tinggi tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, maka akan semakin besar kemudahan akses masyarakat melalui internet. Sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan keterbukaan informasi yang lebih luas termasuk informasi anggaran melalui *website* pemerintah daerah. Disisi lain, meningkatnya penggunaan internet oleh warga telah mendorong permintaan akan informasi anggaran *online*, yang juga telah mengubah perilaku pemerintah.

Nor dkk, (2019) menjelaskan bahwa komitmen kepala daerah terhadap akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk berkontribusi pada akuntabilitas organisasi. Semakin berkomitmen kepala daerah terhadap laporan keuangannya, semakin baik pula opini audit yang diperolehnya yang selanjutnya mendorong mereka untuk lebih mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik agar terlihat baik di mata publik. Apalagi jika terkait anggaran sebagai gambaran rencana keuangan daerah dimasa depan dan pelayanan publik, maka seharusnya kepala daerah lebih komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi tersebut.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Tingkat Kompetisi Politik terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui *website* pemerintah Provinsi

Menurut Baraldi (2015) kompetisi politik merupakan suatu proses kompleks dalam demokrasi dimana adanya persaingan politik untuk mendapatkan kekuasaan politik berupa hak membentuk dan mengontrol arah kebijakan publik. Semakin tinggi kompetisi politik suatu pemerintah daerah maka akan semakin besar kecenderungan kepala daerah untuk menyediakan informasi karena akan menanggung biaya pengawasan yang lebih besar dari saingan politiknya (Laswad dkk, 2005). Dikaitkan dengan teori *stewardship* semakin tinggi presentase calon kepala daerah yang terpilih menunjukkan bahwa harapan masyarakat terpenuhi lebih besar daripada calon yang tidak terpilih. Menurut Citro dkk., (2021), Sutaryo & Amanu, (2020), Ott dkk., (2019), Araujo & Tejedo-Romero, (2016) menyimpulkan adanya pengaruh kompetisi politik terhadap transparansi anggaran pada *website* pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Tingkat Kompetisi Politik berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui *website* pemerintah Provinsi di Indonesia.

Pengaruh *Press Visibility* terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui *website* Pemerintah Provinsi

Press visibility merupakan perhatian media yang lebih mendorong manajemen untuk mengungkapkan sejumlah informasi tambahan (Prokofieva & Clark, 2014). Media dapat memengaruhi persepsi dan perhatian publik terhadap isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan (Laswad dkk., 2005). Sehingga, semakin tinggi tingkat *press visibility* mendorong pemerintah untuk menginformasikan kepada publik

tentang program dan kegiatan sehari-hari pemerintah termasuk untuk mempublikasikan anggaran kepada publik. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana pemerintah sebagai steward berusaha untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada publik. Laswad dkk, (2005) menyatakan bahwa *press visibility* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada pemerintah daerah di New Zealand. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: *Press Visibility* berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui *website* pemerintah Provinsi di Indonesia.

Pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui *website* Pemerintah Provinsi

Tingkat pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu ukuran standar yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2020). Bagi pemerintah daerah, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk terwujudnya *good governance* yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas (Ardipandanto *et al.*, 2015). Kemajuan teknologi informasi komunikasi di dalam pemerintahan juga dapat berperan sebagai penentu transparansi fiskal (Chen dkk, 2019). Puroh-Cid & Bolívar (2018) menyatakan bahwa dengan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah dengan dikembangkannya pengungkapan informasi keuangan melalui *website*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis ketiga yang dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui *website* pemerintah Provinsi di Indonesia.

Pengaruh Komitmen Kepala Daerah terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui *website* Pemerintah Provinsi

Allen & Meyer (1990) menjelaskan bahwa komitmen dalam berorganisasi adalah sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Dikaitkan dengan teori *stewardship* bahwa kepala daerah sebagai *steward* akan komitmen terhadap visi misi serta program yang telah direncanakan. Pemerintah daerah akan memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk melayani *stakeholder* (masyarakat). Salah satu bentuk komitmen kepala daerah dalam keterbukaan informasi terhadap masyarakat adalah transparansi anggaran melalui *website*, karena anggaran merupakan sebagai komitmen politis kepada daerah dalam mewujudkan anggaran pro publik atau sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Adanya motivasi dan komitmen kepala daerah untuk mempublikasikan anggaran daerahnya melalui *website*, akan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengetahui program, visi, misi serta akuntabilitas keuangan pemerintah daerah mereka (Nor dkk, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan sebagai berikut:

H₄: Komitmen Kepala Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Anggaran melalui *website* pemerintah Provinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia sejumlah 34 provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian sensus yang akan meneliti seluruh provinsi yang ada di Indonesia tahun 2016-2020. Namun penelitian ini ada kriteria yang ditetapkan yaitu data yang terkait dengan penelitian tersedia di *website* pemerintah provinsi di Indonesia. Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Tingkat Transparansi Anggaran melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi (Y)
Ketersediaan dokumen anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi berdasarkan Instruksi Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 (Sutaryo & Amanu, 2020)

$$\text{Tingkat Transparansi anggaran} = \frac{\text{jumlah dokumen anggaran yang diungkapkan}}{12} \times 100\%$$

- b. Tingkat Kompetisi Politik (X1)
Jumlah persentase kemenangan dalam pemilihan kepala daerah terakhir pada setiap provinsi di Indonesia (Rahim & Martani, 2016).

$$\text{Tingkat kompetisi politik} = 1 - \% \text{ pemenang pilkada}$$

- c. *Press Visibility* (X2)
Variabel *press visibility* ini di ukur berdasarkan jumlah berita terkait anggaran yang ditampilkan pada *website* resmi pemerintah (Laswad dkk., 2005).
- d. Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (X3)
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi (Badan Pusat Statistik, 2020)
- e. Komitmen Kepala Daerah (X4)
Pernyataan visi dan misi yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD) (Nor dkk., 2021).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis regresi linier berganda dengan alat bantu *SPSS*. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel independen (tingkat kompetisi politik, *press visibility*, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi) komitmen kepala daerah terhadap variabel dependen (tingkat transparansi anggaran pada *website* resmi pemerintah provinsi). Analisis deskriptif dilakukan terlebih dahulu selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan adalah normal dan tidak mengandung gejala multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN DISKUSI

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda menghasilkan informasi yang dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Hasil Pengujian dengan Regresi Linier Berganda

| Variabel | Koefisien Regresi | | t | Sig. |
|--------------|-------------------|------------|-------|------|
| | B | Std. Error | | |
| 1 (Constant) | -,076 | ,195 | -,391 | ,696 |
| POL (X1) | ,289 | ,263 | 1,096 | ,275 |
| PRESS(X2) | ,027 | ,005 | 5,233 | ,000 |
| TIK(X3) | ,016 | ,025 | ,644 | ,521 |
| KOMITMEN(X4) | ,166 | ,048 | 3,455 | ,001 |

Koefisien korelasi R =0,495

Koefisien Determinasi R Square = 0,245

Koefisien *adjusted R-square* = 0,226

Sig F = 0,000

Persamaan Regresi :

$$Y = -0,076 + 0,289 X1 + 0,027X2 + 0,16X3 + 0,166X4$$

Catatan : tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$

POL (X1) = Tingkat Kompetisi Politik

PRESS (X2) = *Press Visibility*

TIK(X3) = Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

KOMITMEN(X4) = Pernyataan Komitmen Kepala Daerah

Sumber: Data diolah (2022)

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,495 menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebesar 49,5%, artinya variabel independen tingkat kompetisi politik, *press visibility*, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, komitmen kepala daerah mempunyai hubungan sedang dengan variabel dependen tingkat transparansi anggaran melalui *website*.

Berdasarkan tabel 1 hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai *adjusted R-square* sebesar 0,226 atau sebesar 22,6 % yang artinya bahwa tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia dapat dijelaskan sebesar 22,6% oleh variabel-variabel tingkat kompetisi politik, *press visibility*, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, komitmen kepala daerah. Sedangkan 77,4 % tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia dijelaskan oleh variabel lainnya diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Konstanta sebesar -0,076 pada persamaan regresi di atas mempunyai arti jika tingkat kompetisi politik, *press visibility*, tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, komitmen kepala daerah dianggap konstan maka menurunkan tingkat transparansi anggaran melalui *website* sebesar 0,076 satuan atau 7,6 %. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya. Nilai Sig. < 0,05 artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai Sig. > 0,05 artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa variabel *press visibility* dan komitmen kepala daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang kurang dari 0,05 atau 5%. Variabel tingkat kompetisi politik dan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikansinya yang lebih dari 0,05 atau 5%.

Nilai koefisien regresi menggambarkan arah pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Jika nilai koefisien regresi bertanda positif maka kenaikan atau penurunan variabel independen sejalan dengan kenaikan atau penurunan variabel dependen. Apabila nilai koefisien regresinya bertanda negatif maka kenaikan atau penurunan variabel independen berlawanan dengan kenaikan atau penurunan variabel dependen. Pada tabel 1 di atas terlihat semua variabel independen mempunyai nilai koefisien regresi yang bertanda positif.

Adapun hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, yaitu sebagai berikut:

Pengaruh Tingkat Kompetisi Politik Terhadap Tingkat Transparansi Anggaran Melalui *Website* Pemerintah Provinsi di Indonesia

Tingkat kompetisi politik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,275 lebih besar daripada 0,05 ($0,275 > 0,05$) yang berarti tingkat kompetisi politik memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia, sehingga hipotesis 1 (H1) ditolak. Tinggi rendahnya tingkat kompetisi politik disuatu daerah tidak menjamin kepala daerah termotivasi untuk meningkatkan transparansi anggaran melalui *website* resminya.

Penyelenggaraan kompetisi politik dalam hal ini pilkada yang tidak bersamaan waktunya diduga sebagai penyebab tidak berpengaruhnya tingkat kompetisi politik terhadap transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan (Birskyte, 2018; Laswad dkk, 2005; Rahim & Martani, 2016). Tingkat kompetisi politik pada pilkada di Indonesia masih tergolong kurang kompetitif. Hal ini dapat kita lihat pada data penelitian sebagian besar daerah memiliki tingkat kompetisi politik dibawah nilai rata-rata. Pengungkapan anggaran melalui *website* resmi pemerintah bukan suatu hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi kepala daerah terpilih, kepala daerah yang terpilih cenderung membuktikan kemenangan dengan kinerjanya selama menjabat di daerah yang di pimpin untuk meningkatkan simpati masyarakat atas pemerintahan yang bersih dan terbuka (Rahim & Martani, 2016). Kepala daerah diwakili Gubernur yang terpilih berperan sebagai *steward* seharusnya

termotivasi dalam mengungkapkan informasi anggaran kepada masyarakat (principal) yang telah memilihnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai *steward*.

Pengaruh *Press Visibility* Terhadap Tingkat Transparansi Anggaran Melalui *Website* Pemerintah Provinsi di Indonesia

Press visibility memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti *press visibility* berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia, sehingga hipotesis kedua (H2) yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *press visibility* maka semakin tinggi pula tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia. Pemerintah daerah yang memiliki *press visibility* lebih besar, akan mengeksplorasi penggunaan beberapa media untuk pelaporan termasuk *website* untuk menyebarkan informasi keuangan dalam rangka mempertahankan elektabilitas kepala daerah tersebut pada pemilihan kepala daerah di periode berikutnya (Laswad dkk, 2005). Perhatian media yang semakin dekat memberikan dorongan untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak (Prokofieva & Clark, 2014). Pemerintah sebagai *steward* berusaha meningkatkan pengungkapan anggaran kepada publik dengan memanfaatkan media *website* agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu menjadi motivasi tersendiri pemerintah daerah untuk menanggapi media yang selama ini cenderung memberitakan hal-hal negatif terkait kebijakan anggaran pemerintah. Sehingga, dengan mengungkapkan informasi anggaran melalui website resmi pemerintah provinsi diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sisi positif kinerja dari pemerintah.

Pengaruh Tingkat Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Tingkat Transparansi Anggaran Melalui *Website* Pemerintah Provinsi di Indonesia

Tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,521 lebih besar dari 0,05 ($0,521 > 0,05$) yang berarti tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah Provinsi di Indonesia, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang diajukan ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu daerah tidak menjamin memberikan motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi anggaran melalui *website* pemerintah Provinsi di Indonesia. Mourao dkk, (2020) menemukan hasil serupa bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi anggaran melalui *website* resmi pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat yang telah memilih kepala daerah lebih memperhatikan kinerja pemerintah secara langsung sehingga cenderung tidak memperhatikan dokumen anggaran yang diungkapkan melalui internet (Mourao dkk., 2020). Berbeda dengan hasil penelitian Chen dkk, (2019) dan Puron-Cid & Bolívar, (2018) yang mengemukakan bahwa tingkat pembangunan teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat transparansi anggaran melalui *website*. Adanya perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu diduga pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam rangka pengawasan kinerja pemerintah. Disisi lain pemanfaatan informasi anggaran pemerintah secara *online* hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja seperti pemanfaatan untuk penelitian.

Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Tingkat Transparansi Anggaran Melalui *Website* Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Komitmen kepala daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil daripada nilai 0,05 yang berarti komitmen kepala daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah Provinsi di Indonesia, sehingga hipotesis keempat (H4) yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini diperkuat Asroel dkk, (2016) yang mengemukakan bahwa komitmen kepala daerah berpengaruh terhadap transparansi keuangan daerah. Semakin tinggi komitmen kepala daerah terhadap transparansi maka semakin tinggi pula tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi. Komitmen kepala daerah terhadap transparansi dalam anggaran menunjukkan penyelenggaraan anggaran bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses anggaran tersebut secara mudah dan jelas. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Nor dkk, (2019) yang menyatakan bahwa komitmen kepala

daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website*. Kepala daerah sebagai *steward* akan berusaha memenuhi komitmen terhadap visi misi serta program yang telah direncanakannya. Pemerintah daerah akan memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

SIMPULAN

Hasil pengujian data dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan *press visibility* dan komitmen kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Sedangkan tingkat kompetisi politik dan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi anggaran melalui *website* pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2020.

Keterbatasan pada penelitian ini beberapa *website* resmi pemerintah provinsi di Indonesia sebagian tidak update bahkan ada juga yang tidak bisa diakses setiap waktu karena sedang perbaikan, sehingga informasi yang didapatkan selama observasi terbatas. Beberapa provinsi membuat format menu konten Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum sesuai dengan Instruksi Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang diuraikan sebelumnya maka saran untuk pemerintah provinsi yang belum melaksanakan Instruksi Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), hendaknya segera mempublikasikan dokumen-dokumen yang diinstruksikan tersebut ke dalam *website* resmi pemerintah provinsi. Masukan bagi pemerintah sebagai regulator bahwa pembentukan regulasi terkait transparansi anggaran pada *website* sangat penting sehingga diperlukan *reward* dan *punishment* bagi pemerintah daerah. Informasi kegiatan pemerintah terkait anggaran merupakan hak masyarakat sebagai stakeholder terbesar pemerintah, sehingga proses penyampaiannya melalui media yang mudah dan cepat untuk diakses. Penelitian selanjutnya terkait transparansi pemerintah daerah di Indonesia sebaiknya mengembangkan suatu indeks transparansi yang dapat mengakomodasi subjektivitas peneliti guna mengukur transparansi suatu pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedó-Romero, F. (2016). Local government transparency index : determinants of municipalities rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 1–20.
- Ardipandanto, A., Ardiyanti, H., Budiman, A., & Sanur, D. (2015). *Pengembangan teknologi informasi komunikasi: Bagi pelayanan publik dan keamanan nasional di daerah*. (Pertama; I. Pahlevi, Ed.). Yogyakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Asroel, R., Basri, Y., & Susilatri, S. (2016). Pengaruh akuntabilitas, ketidakpastian lingkungan, komitmen pimpinan, dan pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (studi empiris pada skpd provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 867–880.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 2019* (Vol. 12, Nomor 95). Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1750/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi--ip-tik--indonesia-tahun-2019>
- Baraldi, A. L. (2015). *Political Competition : Definitions , Sources , and Economic Effects*. 1–7.
- Berliner, D., & Erlich, A. (2015). Competing for transparency: Political competition and institutional reform in mexican states. *American Political Science Review*, 109(1), 110–128.
- Birskyte, L. (2018). Determinants of budget transparency in lithuanian municipalities. *Public Performance and Management Review*, 42(3), 707–731.
- Chen, G., Kang, H., & Luna-Reyes, L. F. (2019). Key determinants of online fiscal transparency: A technology-organization-environment framework. *Public Performance and Management Review*, 42(3),

606–631.

- Citro, F., Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Explaining budget transparency through political factors. *International Review of Administrative Sciences*, 87(1), 115–134.
- García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities. *Local Government Studies*, 36(5), 679–695.
- Klun, M., Benčina, J., & Umek, L. (2019). Online budget transparency index and its determinants in slovenian municipalities. *Public Finance Quarterly*, 64(3).
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121.
- Mourao, P. R., Bronić, M., & Stanić, B. (2020). Discussing the determinants of online budget transparency based on a spatial regression analysis of Croatian cities and municipalities: Do good neighbours make you better? *International Area Studies Review*, 23(3).
- N. Allen, & J. Meyer. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63, 1–18.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128.
- Nor, W., Safrida, L., Rizani, F., & Fitriaty, D. (2021). Transparansi anggaran pada website resmi pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(5).
- Ott, K., Bronic, M., Stanic, B., Klun, M., & Bencina, J. (2019). Determinants of online local budget transparency in croatia and slovenia. *Central European Public Administration Review*, 17(2), 167–188.
- Prokofieva, M., & Clark, C. (2014). The effect of press visibility on voluntary disclosure: Cross-country evidence. *Corporate Ownership and Control*, 11(3), 72–82.
- Puron-Cid, G., & Bolívar, M. P. R. (2018). The effects of contextual factors into different features of financial transparency at the municipal level. *Government Information Quarterly*, 35(1), 135–150.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis pengaruh tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik pemda, dan karakteristik demografi terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan website pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Stanic, B. (2018). Determinants of subnational budget/fiscal transparency: A review of empirical evidence. *Public Sector Economics*, 42(4).
- Sutaryo, S., & Amanu, K. T. (2020). Transparansi informasi pemerintah daerah melalui website: Faktor politik atau keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43.
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2017). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. *Government Information Quarterly*, 37(3), 0–1.